

IMPLEMENTASI PROGRAM *OPEN DEFECATION FREE* (ODF) UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT

Rida Diana^{1*}, Yusuf Adam Hilman², Bambang Widiyahseno³, Robby Darwis Nasution⁴

¹ Sarjana Ilmu Pemerintahan, ² Jurusan Ilmu Pemerintahan,
FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*Jl. Budi Utomo No. 01 Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Indonesia

*Korespondensi: ridadianaa99@gmail.com

Received: 10/08/2022 | Revised: 19/11/2022 | Accepted: 21/11/2022

Abstract

This research was conducted to describe how the government's strategy aims to describe how the local government's strategy is related to the implementation of the Open Defecation Free (ODF) program in Sambilawang Village, Bungkal District, Ponorogo. some factors that emerged were also examined in this study such as supporting factors that became positive assets, as well as inhibiting factors that weakened the program implementation process. This type of research is descriptive research that aims to describe what has existed and is valid. Basically, this research is of a descriptive type which puts forward explanations in the form of a series of logical, systematic sentences, and is built on the findings of facts in the field. The results of this research reveal that the strategy of the Ponorogo local government in implementing the ODF program has so far been at an optimal level, effective and meets a good scale. In particular, Sambilawang Village, which has been given a focus on how to socialize and build decent latrines evenly among the society. Commitment and cooperative action from the Sambilawang Village Government and Pemdes and other village communities in the success of the ODF program is marked by the award at the provincial level which states that Ponorogo is free of ODF or that the quality of the environment is in the livable category. However, the fact that Ponorogo is free from ODF does not necessarily fully evaluate the level of public awareness regarding the findings of open defecation even though they already have proper latrines in their respective homes. But, the fact that Ponorogo is free from ODF does not necessarily fully evaluate the level of public awareness regarding the findings of open defecation even though they already have proper latrines in their respective homes.

Keywords: Program, Latrine, Open Defecation Free (ODF)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan bagaimana strategi pemerintah bertujuan untuk mendeskripsikan terkait bagaimana strategi pemerintah daerah dalam implementasi program *Open Defecation free* (ODF) di Desa Sambilawang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Beberapa faktor yang muncul juga dikaji dalam penelitian ini seperti faktor pendukung yang menjadi modal positif, serta faktor penghambat yang melemahkan proses implementasi program. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang telah ada dan yang berlaku. Pada dasarnya penelitian ini berjenis deskriptif dimana mengedepankan penjelasan berupa rangkaian kalimat logis, sistematis, dan dibangun berdasarkan temuan fakta di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi pemerintah daerah Ponorogo dalam implementasi program ODF sejauh ini berada pada level optimal, efektif, dan memenuhi skala baik. Terkhusus Desa Sambilawang yang telah diberi fokus dengan cara sosialisasi serta pembunan jamban layak secara merata pada warga masyarakat. Komitmen dan tindakan kooperatif dari Pemdes Sambilawang serta Pemdes dan masyarakat desa lain dalam mensukseskan program ODF ditandai dengan adanya penghargaan tingkat provinsi yang menyatakan bahwa Ponorogo telah bebas ODF atau kualitas lingkungan hidup berada dalam kategori layak huni. Akan tetapi fakta mengenai Ponorogo telah bebas ODF tidak serta merta dapat sepenuhnya mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat terkait masih adanya temuan perilaku Buang Air Besar Sembarangan sekali pun mereka sudah memiliki jamban layak di rumahnya masing-masing.

Kata kunci: Program, Jambanisasi, *Open Defecation Free* (ODF).

PENDAHULUAN

Negara berkembang masih menyisakan banyak persoalan kemiskinan serta sederet permasalahan penyerta lain seperti ketidakpedulian terhadap fasilitas kesehatan terutama kesehatan dalam ranah lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2017 WHO sebagai asosiasi kesehatan ternama memiliki catatan penting terkait fakta bahwa sebagian besar masyarakat global berjumlah sekitar 2 milyar belum memiliki papan huni yang layak untuk mencukupi kebutuhan dasar sanitasi dan buang air. Hampir seperempat jumlah masyarakat global masih mempertahankan perilaku primitif dengan cara buang air besar tidak pada tempatnya atau lebih memilih sarana dan media lain seperti kali, sungai, parit, hutan, kebun, jembatan). Potensi terciptanya penyakit lingkungan pada akhirnya menjadi permasalahan serius untuk dapat diantisipasi oleh WHO maupun lembaga kesehatan lain di dunia. Apabila kondisi fasilitas jambanisasi belum membaik, maka potensi penyakit kulit dan lingkungan seperti diare, hepatitis, kolera, dan folio adalah sederet penyakit menular yang bahkan dapat mengancam nyawa seseorang berdasarkan prediksi WHO (Purnamasari, 2021).

Di Indonesia terdapat sebuah program bernama *Open Defecation Free* (ODF) merupakan representasi dalam mewujudkan semangat perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan catatan bahwa masyarakat sudah berperilaku tepat dalam melakukan aktivitas buang air. Kebiasaan buang air besar secara sembarangan merupakan kondisi umum yang diakibatkan oleh budaya turun-temurun terutama bagi masyarakat desa dan pelosok, sehingga tidak mudah untuk mengubah *mindset* sebagian besar masyarakat. Secara kesehatan tentunya perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dapat mengakibatkan pencemaran (bau tak sedap) hingga penyakit, kemudian secara sosial akan merusak tali persaudaraan karena orang dengan perilaku BABS dianggap antipati terhadap lingkungan, terkesan tidak mempedulikan nasib orang lain. Maka dari itu sejatinya program ODF muncul sebagai solusi di daerah, yang mana Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk menjalin koordinasi, kolaborasi, hingga implementasi program ODF bersama lembaga-lembaga dan dinas-dinas lain termasuk bersama masyarakat itu sendiri dalam rangka membangun jamban layak (Arifianty, 2017).

Program Desa ODF berorientasi pada penciptaan lingkungan hidup sehat dengan cara merangsang perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih modern serta memiliki intensitas kepedulian terhadap lingkungan alami. Pada dasarnya program Desa ODF berbasis masyarakat, maka dari itu antara pemerintah dan masyarakat secara otomatis harus bekerjasama untuk mengedepankan kepentingan satu sama lain dan mengevaluasi hal-hal penting dalam rangka penciptaan lingkungan sehat. Kriteria dari implementasi program Desa ODF setidaknya memiliki parameter tersendiri yang berfungsi sebagai ukuran evaluatif di antaranya adalah: *pertama*, seluruh masyarakat desa telah patuh buang air besar di jamban layak tanpa terkecuali. *Kedua*, kedisiplinan dalam menjaga lingkungan hidup diupayakan secara kolektif oleh masyarakat desa tanpa disosialisasikan secara terus-menerus, atau cukup diberikan aturan mengikat agar mengikat kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar (melakukan tindakan BABS) karena pemerintah telah mendukung pembangunan jamban layak secara memadai. *Ketiga*, perilaku tidak BABS menjadi budaya gotong-royong dalam konteks masyarakat telah memahami pentingnya pemeliharaan kesehatan lingkungan serta dampak positif dan negatifnya terhadap orang lain di sekitar.

Program ODF merupakan agenda nasional yang menjadi tugas, kewenangan, serta tanggungjawab pemerintah melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada masyarakat di daerah. Cakupan masyarakat di daerah yang sangat luas memerlukan adanya aturan baku agar proses implementasi program ODF lebih optimal dan dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung kesuksesan program ODF, beberapa pilar diciptakan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Permenkes RI No 3 Th. 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang berisi tentang beberapa pilar menuju penciptaan lingkungan hidup sehat seperti: stop BABS, cuci tangan dengan sabun bersih, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sehat, dan pengelolaan air limbah rumah tangga. Program ODF menjadi salah satu pilar diantara 4 pilar yang telah disebutkan sebelumnya dimana memiliki cakupan dari mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten (Kasanah, 2018).

Untuk menambah referensi dalam penelitian ini dan membandingkan masalah terkait, maka perlu untuk merujuk penelitian terdahulu seperti berikut:

Penelitian sejenis mengenai implementasi program ODF dapat ditemukan pada penelitian milik Juniarti et al (2018) yang menemukan fakta bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap warga masyarakat di Desa Sungai Dua Banyuwasin. Deksipri di sekitar lingkungan tersebut diakui bahwa pembuatan jamban sehat belum dapat dipenuhi oleh seluruh warga masyarakat atas dasar kendala biaya, sehingga dengan sanga terpaksa perilaku buang air besar tidak pada tempatnya (sembarangan) tetap menjadi pilihan warga masyarakat sekitar terutama dengan media aliran sungai besar.

Penelitian kedua milik Purnaweni (2018) yang menemukan fakta bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap program ODF atau sanitasi lingkungan sebagai faktor *urgent* belum benar-benar baik atau dapat dikatakan masyarakat belum memiliki komitmen dan bentuk partisipasi aktif dalam bergotong-royong membantu pemerintah mengentaskan persoalan menciptakan lingkungan hidup sehat.

Ponorogo menjadi salah satu daerah percontohan yang memiliki *trend* positif dalam monitoring dan pengembangan implementasi program ODF pemerintah di tahun 2021. Perbup Ponorogo No.93 Th. 2019 sengaja didesain untuk merepresentasikan program ODF yang berasal dari pemerintah pusat untuk dijadikan pedoman bersama bagi seluruh pemerintah dan masyarakat pada level kecamatan hingga level desa secara seksama. Perbup tersebut sejatinya mengusung tema jambanisasi dan bentuk dukungan Pemkab Ponorogo dengan suntukan dana APBD 2019 untuk digelontorkan ke seluruh pelosok desa dengan kekayaan jamban minim. Dinkes Ponorogo menjadi salah satu lembaga paling diandalkan dalam merealisasikan Perbup Ponorogo No. 93 Th. 2019, sebagai perpanjangan tangan dari Pemkab Ponorogo sepanjang masa perbaikan kualitas jamban berlangsung atau hingga tercapainya target sempurna, masif, dan layak.

Sejumlah penghargaan diraih oleh Pemkab Ponorogo dalam kategori baik terhadap pengelolaan jamban sehat, penerapan pola hidup sehat, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi berkesinambungan kepada masyarakat untuk mematuhi 5 pilar STBM terutama stip buang air besar sembarangan. Di tahun 2021 Kemenkes RI bersama dengan jajaran Bupati, Wakil, serta OPD Ponorogo memberikan penilaian resmi melalui acara STBM *Award* (15/10/2021). Esensi dari acara STBM *Award* sebenarnya bukan acara simbolis yang membandingkan antara daerah satu dengan daerah lain yang memiliki prestasi, akan tetapi acara tersebut dimaksudkan untuk memicu semangat dan motivasi agar daerah-daerah lain dapat lebih gigih mengejar ketertinggalan dengan daerah lain dan terus memperbaiki kualitas pembangunan mulai dari tingkat desa.

Desa Sambilawang di Kecamatan Bungkal Ponorogo dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mengurai tentang bagaimana cara pemerintah desa menjalankan, memonitor, hingga mengevaluasi jalannya program ODF dengan pengakuan sukses. Pemdes Sambilawang dan masyarakat memegang peranan kunci dimana efektivitas kolaborasi antar keduanya berhasil menggeser gaya hidup lama menjadi gaya hidup baru yang lebih sehat dalam perihal perilaku buang air besar. Terhitung semenjak tahun 2019 hingga akhir tahun 2022, kepemilikan jamban layak model leher angsa sudah banyak digandrung oleh masyarakat. Penggunaan jamban konvensional yang kurang ramah lingkungan seperti jamban model cemplung terbuka & cemplung tertutup mulai ditinggalkan, termasuk generasi tua juga turut memiliki perubahan pola hidup sehat.

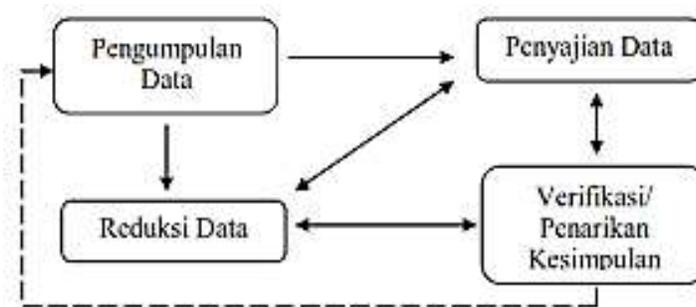
Desa Sambilawang selama beberapa tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 memiliki catatan penting sebagai bagian dari fakta lapangan. Fakta terkait bagaimana sulitnya berkoordinasi dengan masyarakat serta sulitnya mengubah pola pikir dan kebiasaan lama (turun-temurun). Status desa bebas ODF tidak serta merta didasarkan atas berjalannya program pembangunan jamban, akan tetapi apabila tidak diimbangi dengan kooperatif dari warga masyarakat desa sambilawang segala proses akan terhambat dan tentunya membutuhkan waktu lebih lama, sehingga lambat laun akan tertinggal oleh desa-desa lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana strategi dari pemerintah daerah dalam implementasi program ODF dengan cara melihat dinamika pemerintah dan masyarakat di desa Sambilawang Ponorogo. Perihal sosialisasi, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi adalah beberapa faktor menarik yang perlu untuk dikaji dan dicari kebenarannya karena pada dasarnya asumsi mengenai sulitnya merubah pola pikir masyarakat desa bukan suatu kekeliruan. Karena sejatinya kunci dari adanya perubahan dan perbaikan tergantung dari seberapa efektif cara, upaya, tindakan, serta strategi dari pemerintah itu sendiri. Fungsi

kelembagaan dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa menjadi bagian fokus tersendiri karena dampak yang dihasilkan terkait adanya program ODF dapat terlihat dengan jelas.

METODE

Teknik *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini diimbangi dengan metode wawancara terstruktur. Kedua teknik dan cara tersebut merupakan pilihan yang paling efektif dalam penelitian ini untuk menentukan informan dilihat dari pertimbangan terkait (kredibilitas) atau kompetensi seorang informan dalam menjawab pertanyaan, menggambarkan suatu peristiwa/konsep/maupun runtutan penjelasan secara gamblang kepada peneliti. Kualitas perolehan data menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan, karena jawaban asli dari para informan dirangkai ulang secara deskriptif oleh peneliti menggunakan tata bahasa yang lebih efektif, atau dalam arti lain tidak terlalu bertele-tele sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Penentuan informan dilakukan secara seksama bermodalkan pengamatan selama masa penelitian berlangsung, sehingga peneliti merasa peka untuk meyakini pemilihan informan sesuai dengan target dan tujuan efektivitas data.



Gambar 1. Skema analisis data

Sumber: Miles et al., 2014.

Rincian penggunaan metode penelitian berdasarkan bagan di atas dapat disimak dalam pengejawantahan di bawah:

Observasi. Peneliti memiliki pengalaman langsung dengan cara melihat objek penelitian (lapangan), jadi peneliti tidak diwakilkan oleh kehadiran orang lain. Peneliti menggunakan seluruh indera mulai dari penglihatan dan pendengaran, serta analisa pribadi untuk dijadikan sebagai proses membangun argumen awal (hipotesis), sehingga langkah selanjutnya adalah tinggal mendalami satu per satu petunjuk informasi penelitian sesuai dengan tema yang sedang diangkat. (Sugiyono, 2015) Desa Sambilawang yang ada di Kecamatan Bungkal Ponorogo dijadikan sebagai objek observasi terkait implementasi program ODF, sehingga peneliti lebih baik menyiapkan instrumen untuk mencatat temuan penelitian secara berhati-hati.

Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sambilawang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, kebijakan-kebijakan pemerintah dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Dalam Implementasi Program ODF

Pelaksanaan program di masyarakat secara intensif sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan garis besar program bernama sanitasi total hingga tahun 2012 sebelum berganti nama menjadi STBM. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terbilang serius, karena ditunjukkan melalui pembuatan regulasi dalam rangka mempercepat kesuksesan program ODF. Dinas Kesehatan memaksimalkan dengan cara sosialisasi berjenjang dan praktek pelatihan pembuatan jamban sehat pada tiap-tiap kelompok di masyarakat di seluruh desa Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 307 desa, serta dibantu oleh kader kesehatan di tiap-tiap Puskesmas. Sejak awal program belum berjalan maksimal, kira-kira hanya mencakup 50%. Sehingga upaya lebih lanjut dari pemerintah Ponorogo

dari tahun-ke tahun adalah meningkatkan implementasi program ODF melalui bantuan dana untuk membangun jamban sehat. Hubungan koordinasi dari pemerintah kabupaten dengan seluruh pemerintah desa terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga melalui kesadaran sebagian besar masyarakat dan kepala desa, di tahun 2020 kabupaten Ponorogo dikategorikan sebagai desa berpredikat ODF (Hasil wawancara Teguh Budi Prihwanto, 02 Juli 2022).

Membahas penjelasan di atas, sangat penting untuk memahami urgensi dari program ODF sebagai basis penciptaan lingkungan sehat bagi masyarakat. Maka dari itu kerangka berfikir dari pihak terkait seperti pemerintah memerlukan gagasan pokok agar sepadan dengan tindakan penyelesaian masalah di lapangan. Fakta di atas terkait bagaimana pemerintah kabupaten Ponorogo melalui dinas kesehatan dalam merealisasikan program ODF untuk tercipta lingkungan hidup sehat dapat disandingkan dengan amanat beberapa teori relevan. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

- Fokus penciptaan lingkungan yang stabil dalam taraf sehat adalah menysasar pada kebebasan akses, pemerataan, serta pemenuhan pelayanan. Prinsip keadilan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat juga perlu disokong dengan keadilan untuk menyamaratakan layanan hingga pembiayaan dimana masyarakat tidak akan sulit untuk memenuhi beban tanggungan terutama bagi masyarakat miskin (Sulaeman, 2021).
- Keadaan ekonomi yang miskin dapat menciptakan situasi baru dimana masyarakat sulit untuk peduli terhadap lingkungan hidup sehat atau terkesan acuh terhadap keberadaan orang lain sehingga potensi terciptanya penyakit lingkungan tidak dapat dipungkiri (Sulaeman, 2021).

Teori di atas dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap temuan lapangan, bahwa sebenarnya kondisi lingkungan adalah faktor mendasar yang sangat penting untuk diperhatikan agar masyarakat berada dalam kondisi stabil sehingga tidak berpotensi merusak tatanan lingkungan sosial serta ancaman penyakit kesehatan lainnya. Contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah Ponorogo melalui program ODF merupakan bukti konkrit yang sejalan dengan kedua teori di atas sebagaimana pemenuhan pelayanan dan pemerataan tidak boleh terlalu membebani masyarakat terutama kategori miskin, maka dari itu diperlukan program seperti ODF yang memberikan fasilitas gratis kepada masyarakat agar mandiri dan berdaya.

Upaya untuk mencetuskan predikat lingkungan sehat dapat dioptimalisasi melalui program yang dikelola pemerintah, untuk kemudian tidak dianulir oleh masyarakat karena muncul sebagai suatu kebijakan yang tepat arah. Kepentingan masyarakat bukan berarti bersifat individu, melainkan hubungan antar individu dengan individu lain dalam wadah lingkungan. Maka dari itu sangat tepat apabila pemerintah bertindak sebagai penyedia program layanan, pelaksana layanan, hingga evaluator pelayanan.

Predikat desa ODF diperoleh melalui verifikasi berbagai lembaga terkait seperti Dinkes Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi, Komunitas Wartawan, Tokoh Sanitasi Provinsi sesuai dengan kriteria-kriteria ideal berdasarkan teknik *sampling*. Verifikasi dilakukan terutama di wilayah-wilayah desa yang memiliki aliran sungai besar maupun kecil di mana rawan untuk dijadikan objek buang air besar sembarangan. Akan tetapi predikat kabupaten ODF masih menyisakan sebagian kecil masyarakat dengan perilaku buang air sembarangan, dalam arti lain skala nya semakin mengecil tiap tahun untuk mendukung terwujudnya kabupaten sehat. Percepatan keberhasilan program ODF juga dipengaruhi oleh besarnya motivasi dari desa-desa di Ponorogo untuk mendapatkan *reward* dari Bupati, sehingga desa-desa lain ikut terpicu untuk menuju ODF (Hasil wawancara Ari Susanti, 20 Juni 2022).



Gambar 2. Contoh Verifikasi ODF Tingkat Desa se-Kab. Ponorogo
Sumber: Dokumentasi lapangan, 2022.

Kegiatan Advokasi dalam Mengembangkan Komitmen Bersama untuk Melembagakan Program Open Defecation Free.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah menjalin hubungan kerjasama tetapi bukan dalam bentuk pembentukan kurikulum pendidikan di dalam mata pelajaran (karena sifat kurikulum itu luas). Akan tetapi kerjasama dilakukan dengan praktik langsung di lapangan, bertujuan untuk menumbuhkan karakteristik kepedulian kesehatan lingkungan bagi anak usia sekolah. Proses Dinkes dalam menggandeng Dindik Ponorogo dilakukan dengan cara kolaborasi berkegiatan, misalnya ketika ada kegiatan di sekolah maka petugas Dinkes yang berada di Puskesmas akan melakukan *screening* untuk anak-anak sekolah disertai dengan materi-materi pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan lingkungan sehat. Kegiatan lain yang diberikan oleh Dinkes kepada anak-anak usia sekolah (terutama SD) adalah mendata secara masif perihal kepemilikan jamban di rumah masing-masing dengan cara bertanya langsung terhadap anak, akan tetapi hambatan terkadang datang dari internal anak karena merasa malu untuk menyampaikan keadaan sebenarnya di rumah terkait diskusi jamban. Organisasi dan kelompok penyangga lain juga banyak terlibat diantaranya: Karang Taruna, PKK, sebagai optimasi pemanfaatan organisasi yang dekat dengan masyarakat bawah. Program ODF yang dicanangkan oleh pemerintah pusat merupakan wacana yang harus ditangkap oleh daerah untuk kemudian meneruskan menjadi upaya-upaya teknis, terstruktur, dan masif kepada tingkat masyarakat bawah di level desa (Diolah dari Wawancara Susiana Dewi, 08 Juli 2022).

Fakta lapangan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bila & Saputra (2019) yang menegaskan bahwa di dalam konteks *collaborative governance* tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih efisien. Persepsi yang sama antara kedua belah pihak di dalam konteks kolaboratif merupakan tantangan tersendiri dalam rangka melihat suatu permasalahan untuk kemudian dipecahkan bersama. Tata kelola pemerintahan dalam menyusun strategi untuk menjawab kebutuhan masyarakat membutuhkan solusi tepat dan tidak boleh hanya terpaku pada hasil, akan tetapi perlu untuk bertumpu pada proses.

Bila & Saputra (2019) juga memberikan penegasan bahwa *collaborative governance* menjadi dasar atas masalah publik (masyarakat) serta orientasi utamanya adalah untuk pemecahan masalah. Ada pun bentuk kolaborasi atau pun konsep kerjasama antara elemen pemerintah terkait sebisa mungkin perlu untuk dikuatkan dengan bentuk interaksi, komunikasi, kompromi, serta kepedulian tinggi karena tidak semua pihak merasakan langsung permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Analisis yang dapat dilakukan terhadap fakta dan teori di atas adalah mengenai bagaimana fungsi lembaga pemerintah sebagai wadah solutif yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat terutama kesehatan. Kesehatan dan lingkungan hidup sehat merupakan kesatuan ruang lingkup yang tidak dapat dipisahkan karena di dalamnya terdapat hubungan sosial antara individu

satu dengan individu lain. Prinsip lain yang seharusnya juga diciptakan oleh pemerintah adalah terkait rasa saling menghargai satu sama lain sehingga perspektif masyarakat dapat dibentuk dengan kompak untuk menciptakan lingkungan sehat.

Komitmen, Kebijakan, Peraturan, Koordinasi Kelembagaan, Dan Monitoring Lapangan

Adanya upaya sistemik melalui kinerja dan sinergi kolektif dari lembaga lintas sektor yang masing-masing menaruh peranan penting untuk menyukseskan program ODF di Ponorogo. Keaktifan tenaga fasilitator di lapangan lebih ditonjolkan sebagai berfungsinya garis koordinasi dari daerah-puskesmas-hingga petugas lapangan di level desa. Selain itu komitmen dari warga masyarakat juga penting dan menjadi perhatian khusus agar perilaku ODF dapat tertekan, serta semakin landai jumlahnya setiap tahun. Dalam merumuskan situasi maupun kondisi terkait perilaku masyarakat, keterlibatan tokoh-tokoh sentral di desa terbilang unik. Karena ada semacam perspektif kuat yang mengakar di masyarakat, bahwa orang-orang terdekat lebih didengarkan daripada pihak sekelas pemerintah maupun lintas sektor sejawat (Hasil wawancara dengan Supiana, 08 Juli 2022).

Fakta di atas perlu dikaitkan memiliki kesamaan esensi dengan penelitian Raharjo et al (2019) yang menemukan hasil penelitian bahwa tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pun sebutan tokoh asli lingkungan memiliki hubungan sangat erat dengan masyarakat lingkungan tersebut. Eratnya hubungan antara tokoh masyarakat dan masyarakat lingkungan dapat diukur dari sejauh mana bentuk komunikasi, cara komunikasi, serta penyebutan tokoh dengan intensitas tinggi sehingga dikenal luas. Selain itu partisipasi masyarakat akan lebih mudah dikoordinasi dengan memanfaatkan keterlibatan dari tokoh sekitar, hal ini menjadi fakta unik karena sifat dari masyarakat desa sendiri sangat menjunjung tinggi ikatan emosional, gagasan dasar, serta memelihara kepercayaan (nilai-nilai lama).

Maka dari itu peran dari petugas pemerintah sebagai perwakilan di lingkup desa menjadi lebih stabil dan efektif dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh. Bagaimana pun persepsi masyarakat yang sejak awal mengakar kuat tidak dapat dengan mudah untuk diubah walau pun suatu program pemerintah bersifat positif. Akan tetapi, untuk meyakinkan masyarakat desa membutuhkan suatu keyakinan, komitmen, serta modal komunikasi yang tepat arah agar tidak timbul potensi konflik atau pun kesalahpahaman.



Gambar 3. Sertifikat kompetensi petugas Puskesmas Bungkal Bidang Kesehatan Lingkungan
Sumber: Dokumentasi lapangan, 2022.

Penelitian sejenis lain yang memiliki kesamaan esensi dengan fakta di atas adalah penelitian dari Daraba (2017) dimana menemukan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah dapat diukur dari tingkat kesadaran atau keterlibatan aktif untuk berkontribusi sukarela termasuk dalam tahap pembangunan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Indikator tingkat partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari pengetahuan sosial internal desa, serta sumbangan keterampilan dan tenaga untuk membantu realisasi agar dapat lebih cepat merasakan adanya program/pembangunan.

Penelitian Daraba (2017) juga menemukan fakta bahwa usulan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh biasanya lebih didengar dan menjadi bahan pertimbangan bersama untuk mengambil keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah perihal tentang menyetujui atau tidak jika ada sosialisasi program pemerintah baik pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

Pengawasan Dan Evaluasi Program

Pada prinsipnya Pemdes Sambilawang menerapkan strategi umum dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat secara berkesinambungan. Secara garis besar di desa Sambilawang saat ini nihil perilaku buang air besar sembarangan seperti memanfaatkan media kali (sungai). Situasi kondusif telah terbangun melalui cerminan perilaku masyarakat. Evaluasi dan tindak lanjut untuk *follow up* perkembangan program dilakukan secara rutin sepanjang masih ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh program STBM Pilar Pertama dalam arti belum memiliki kesadaran dan perilaku Buang Air Besar secara normal. Dalam proses wawancara panjang, Kepala Desa Sambilawang juga menuturkan bahwa program jambanisasi (ODF) di setiap desa pada prinsipnya memiliki kesamaan tujuan, sehingga peran lembaga desa hanya memantapkan program nasional ODF dan mempertahankan perilaku masyarakat di taraf ideal. Terkait peran dalam memfasilitasi pembangunan jamban pada kelompok masyarakat, implementasi dari segi pendanaan di-cover oleh Dinas Kesehatan Ponorogo. Desa Sambilawang di tahun 2019 awal menjelang 2020 menempati urutan pertama sebagai bebas dan disiplin ODF jika dibandingkan dengan seluruh desa lain yang ada di Kecamatan Bungkal. Karena desa-desa lain belum ada yang berhasil menyentuh prosentase 100% dalam kategori cakupan jamban sehat kecuali beberapa desa seperti Bungkal, Bancar, dan Nambak (Hasil wawancara dengan Sumadi, 17 Juni 2022).

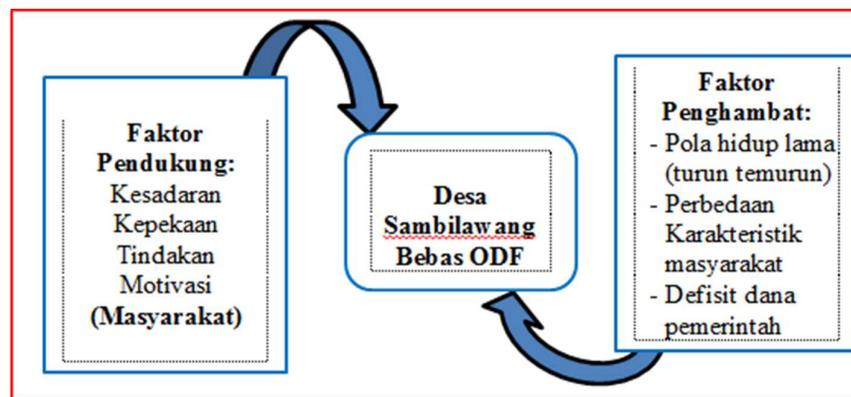


Gambar 4. Piagam Penghargaan Desa Sambilawang Bebas ODF
Sumber: Dokumentasi lapangan, 2022.

Disiplin masyarakat desa Sambilawang tidak dapat dipisahkan dari evaluasi rutin yang dilakukan sebagai basis kontrol untuk memetakan progress terkait perilaku masyarakat. Pada dasarnya setiap program yang bersifat membangun kehidupan masyarakat supaya lebih layak, tidak dapat dilepaskan dari proses jangka panjang maupun pendek terutama ketika pola perilaku masyarakat sudah menjadi kebiasaan lama. Maka dari itu kunci utama untuk memecah persoalan adalah dengan cara sosialisasi oleh pemerintah terdekat (pemerintah desa), sekali pun program yang dijalankan adalah program level nasional akan tetapi pemerintah desa tentu lebih mengetahui seluk-beluk, sosial budaya, serta nilai-nilai penting dalam struktur internal masyarakatnya.

Kesadaran Swadaya serta Motivasi Masyarakat

Penjabaran pada sub bab ini termasuk cara peneliti untuk memperkuat data dan observasi lapangan. Hasil wawancara telah jelas menyinggung bahwa sebagian kecil warga masyarakat memilih tindakan konkrit untuk tidak terlalu bergantung pada penyaluran dana dari pemerintah untuk urusan pembangunan jamban. Artinya dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat yang secara swadaya rela menanggung pendanaan untuk pembangunan jamban permanen merupakan kategori tindakan atau perilaku yang mencerminkan tujuan untuk hidup lebih sehat.



Gambar 5. Analisis faktor pengaruh ODF

Sumber: Hasil penelitian, 2022.

Beranjak dari kebiasaan lama (perilaku BABS) kepada kebiasaan baru terbilang sulit dilakukan sekali pun pemerintah memiliki program untuk diimplementasikan, hal ini dapat dibuktikan dengan pemetaan karakteristik masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda (lihat hasil wawancara dengan bapak Teguh) pada halaman di atas. Maka dari itu merangsang pola pikir dan kesadaran masyarakat adalah tujuan yang efektif apabila dicapai melalui implementasi kebijakan/program, setelah itu faktor-faktor pendukung maupun penghambat akan mempengaruhi baik dari segi proses, kualitas, dan efektivitas waktu.

Faktor penghambat dan faktor pendukung saling mengikat satu sama lain dalam mempengaruhi Desa Sambilawang menuju ODF. Pada akhirnya implementasi kebijakan pemerintah dapat terealisasi dengan baik di Desa Sambilawang seiring dengan berjalannya waktu dan terbentuknya pola pikir untuk menuju hidup secara lebih sehat serta tidak menimbulkan dampak sosial (resiko sosial) bagi warga masyarakat. Selain itu cerminan perilaku masyarakat tidak terlepas dari adanya sosialisasi, himbuan, teguran, dan evaluasi sejak awal digencarkan program ODF. Di sisi lain yang menjadi pembeda adalah karakteristik bawaan dari sebagian besar masyarakat desa Sambilawang yang bisa dikatakan berada dalam kurva normal, atau dalam arti lain tidak melakukan penolakan implementasi program ODF dari pemerintah, akan tetapi juga membutuhkan pendekatan khusus untuk menciptakan kesadaran seiring dengan berjalannya waktu

Perbandingan Data Konkrit

Penelitian ini berjenis kualitatif, maka deskripsi mengenai data-data angka tidak terlalu ditampilkan secara mendetail kecuali pada halaman LAMPIRAN yang secara lengkap memuat data-data lapangan berdasarkan observasi penelitian, wawancara mendalam dengan informan, serta

dokumentasi foto. Maka dari itu untuk menyusun pembahasan pada sub bab kali ini, peneliti akan membagi ke dalam beberapa garis besar sebagai berikut:

Tabel 1. Data jenis jamban di Desa Sambilawang Tahun 2019-2022

Tahun	Leher Angsa	Jumlah Pengguna	Cemplung Tertutup	Jumlah Pengguna	Prosentase Jamban Sehat
2019	712	905 KK 2262 jiwa	26	45 KK 97 jiwa	100 %
2020	712	923 KK 2263 jiwa	26	29 KK 98 jiwa	100%
2021	712	972 KK 2345 Jiwa	8	8 KK 32 jiwa	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Data Tribulan Laporan Penyehatan Lingkungan Jamban Keluarga, 2022.

Mencermati tabel di atas yang telah diolah oleh peneliti, sebenarnya dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir Desa Sambilawang telah berhasil mempertahankan cakupan prosentase jamban sehat melalui pendataan di seluruh Kecamatan Bungkal. Desa Sambilawang menjadi percontohan bagi desa-desa lain yang masih menggunakan jamban kategori cemplung terbuka maupun memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana buang air besar maupun kecil, atau dalam kamus kesehatan dapat disebut juga BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Data yang diberikan oleh petugas kesehatan lingkungan Desa Sambilawang berdasarkan catatan dan survey terjun lapangan terbaru di tahun 2022 tentang kepemilikan jamban cemplung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data kepemilikan jamban cemplung tahun 2022

Nama Dukuh	Nama Warga	Alamat RT/RW
Ngijo	Katinem	1/1
Suki	Dukut	2/2
	Miranto	2/2
	Mesinah	2/2
	Dami	2/2
	Tubari	1/1
Bandang	Katinem	2/1
	Mukti	2/2

Sumber: Hasil observasi 02 Agustus 2022

Kepemilikan jamban di atas terbilang sangat minim mengingat status Desa Sambilawang di tahun ini adalah sudah ODF bahkan sejak akhir 2019. Mencermati nama-nama pemilik dan pengguna jamban cemplung sesuai dengan gambar di atas faktanya didominasi oleh generasi tua yang tersebar di seluruh 4 Dukuh (Ngijo, Suki, Patran, Bandang) yang ada di Desa Sambilawang Kec. Bungkal per tahun 2022. Analisis mengenai nama-nama yang termasuk kategori tua tersebut sekaligus mempertajam fakta bahwa pola kebiasaan hidup lama memerlukan proses untuk diubah, dan Desa Sambilawang terbilang sukses karena kepemilikan jamban cemplung dan perilaku BABS di sungai sejak awal digencarkannya program ODF sudah berkurang sangat banyak prosentasenya.

Realisasi Program Jambanisasi di Desa Sambilawang

Berikut adalah sajian data nya berdasarkan pengamatan dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dari unsur petugas Kesehatan Lingkungan Desa Sambilawang (Bidan), serta kepada unsur masyarakat penerima program jambanisasi.

Tabel 3. Rincian anggaran dana

Jenis Material	Jumlah/Satuan	Tafsiran Dana Total Per- Rumah
Jamban Leher Angsa	1/buah	
Semen	2 sak	
Pasir	1 kubik	Rp. 700.000
Paralon	2 buah	
Besi	2 buah	
Material Penunjang Lain		Penjelasan
Batu Bata	Opsional (Bersifat Pilihan) sesuai selera masing-masing masyarakat	Masyarakat di Desa Sambilawang biasanya mencukupi kebutuhan melalui biaya pribadi (swadaya) untuk menyempurnakan konstruksi jamban dasar yang berasal dari program <i>Open Defecation Free (ODF)</i> milik pemerintah.

Sumber: Hasil observasi, 2022

Rincian yang berusaha dicari oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui detail informasi dan memaksimalkan data, atau dapat juga dimunculkan sebagai suatu data pembandingan dengan melihat fakta di tempat lain maupun penelitian lain baik penelitian lama maupun penelitian baru terkait program jambanisasi atau *Open Defecation Free (ODF)*. Perbandingan yang dimaksud peneliti adalah tentang teknis pemberian dana atau material konstruksi jamban kepada masyarakat, yang kemungkinan antara desa satu dan desa lain belum tentu sama.



(a)



(b)

Gambar 6. Jamban leher angsa non permanen (a) dan jamban leher angsa permanen (b)

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2022.

S



(a)



(b)

Gambar 7. Jamban ceplung terbuka (a) dan jamban ceplung tertutup (b)

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2022.

Kondisi Before-After Kepemilikan dan Penggunaan Jamban Sebelum ODF-Bebas ODF.

Pendataan mengenai kategori jamban milik warga masyarakat dilakukan ketika menjelang program ODF muncul (untuk data lengkapnya dapat dilihat pada bagian LAMPIRAN). Pada prinsipnya masyarakat di Desa Sambilawang sejak awal terbilang cukup banyak yang belum memiliki jamban layak atau jamban sehat permanen, disamping itu generasi tua mendominasi perilaku BABS di sungai atau aliran semacam sungai. Untuk tahun 2022 progress dari desa Sambilawang dalam mempertahankan Desa ODF dapat dibuktikan dengan mencermati gambar 6. Data dalam gambar 6 tersebut merupakan sedikit sisa dari sekian banyak peralihan penggunaan jamban kurang layak menuju penggunaan jamban layak (leher angsa & ceplung tertutup). Sejak awal desa Sambilawang tidak hanya mendapat bantuan dana untuk pembangunan jamban dari unsur pemerintah semata, tetapi dari unsur lembaga lintas sektor seperti Koramil (Hasil wawancara Susiana Dewi, 02 Agustus 2022).

134

PENUTUP

Keberhasilan pemerintah daerah Ponorogo dalam menerapkan strategi menuju ODF (*Open Defecation Free*) di Desa Sambilawang merupakan usaha bersama dari berbagai pihak lintas sektor serta kesadaran tinggi masyarakat yang mempercepat kesuksesan status desa ODF di awal tahun 2020. Pemerintah daerah Ponorogo yang berfokus untuk menyusun rangkaian sebagaimana Perbup No.17 Tahun 2018 pada akhirnya mampu untuk ditangkap oleh pemerintah desa Sambilawang sebagai suatu instruksi penting dalam menciptakan pola hidup sehat di ranah masyarakat. Akan tetapi dapat disimpulkan jika strategi yang diterapkan tidak berjalan mulus tanpa bantuan dari berbagai faktor pendukung, karena ditemukan juga faktor penghambat untuk dihadapi pemerintah daerah Ponorogo. Penerapan strategi dalam bentuk melakukan sosialisasi dan hubungan koordinasi antar lembaga lintas sektor pada akhirnya mampu direspon baik oleh pemerintah desa Sambilawang, dan diteruskan menjadi upaya-upaya teknis lapangan secara rutin kepada warga masyarakat desa Sambilawang. Motivasi tinggi dari masyarakat desa Sambilawang juga menjadi faktor pendukung di tengah hambatan besar terkait defisit dana gelontoran APBD pembangunan jamban dari pemerintah daerah Ponorogo yang terkadang tidak cukup untuk meng-cover kebutuhan. Pada akhirnya hambatan yang tetap ditemui di desa Sambilawang terkait ODF, berjalan beriringan dengan solusi atas kesadaran warga masyarakat yang secara swadaya menunjukkan kemauan untuk berubah atau menjadi bagian dari solusi ketika ditemui defisit anggaran dalam beberapa kasus pembangunan jamban layak.

Status Desa Sambilawang yang saat ini Bebas ODF adalah representasi dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memicu perkembangan pola hidup sehat melalui program ODF. Dapat disimpulkan bahwa peralihan penggunaan jamban kurang layak menuju jamban layak merupakan

kondisi dimana faktor-faktor lain ikut terlibat atau mempengaruhi satu sama lain terutama dari unsur masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya dapat memahami tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah melalui kesadaran dan tindakan nyata.

Jika disimpulkan terkait masih tersisanya penggunaan jamban-jamban kurang layak kategori Cemplung oleh beberapa masyarakat di Desa Sambilawang, pada dasarnya mereka termasuk generasi tua yang secara turun-temurun mempertahankan pola berperilaku dalam buang air. Akan tetapi kondisi tersebut merupakan bagian dari proses tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam program ODF 100% karena secara tidak langsung perilaku BABS oleh sebagian besar masyarakat di Desa Sambilawang semakin berkurang seiring dengan berjalannya realisasi program ODF. Walau pun masyarakat di Desa Sambilawang belum 100% memiliki jamban leher angsa, tetapi pada prinsipnya implementasi kebijakan pemerintah dalam program ODF yang diterapkan di Desa Sambilawang selama beberapa tahun belakangan telah membuahkan hasil maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Kecamatan Bungkal, dan juga Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianty, D. P. (2017). Peran Pemerintah Lokal dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat: Studi Tentang Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3).
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196-210.
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52-58.
- Sulaiman, E. S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Juniarti, V. R., Alfatih, A., & Siswanto, J. (2018). *Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) (Studi di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018)*. Palembang: Sriwijaya University (skripsi).
- Kasanah, S. U. (2018). Upaya Mewujudkan Desa Open Defecation Free di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 3(3), 354–364.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Peraturan Bupati Ponorogo No 93 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Stimulasi Jambanisasi
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Purnamasari, O. (2021). *Implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat: Stop buang air besar sembarangan (Open Defecation Free) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Purnaweni, H. (2018). Open Defecation Free (ODF) Program as an urgent public service in Semarang city, Central Java. *E3S Web of conferences*, 73, p. 02010.
- Raharjo, S. T., Humaedi, S., Wibhawa, B., & Apsari, N. C. (2019). Memetakan Tokoh Masyarakat Untuk Kegiatan Csr Partisipatif. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 37-48.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.